

Media Cetak	Harian Fajar
Tanggal	Senin 2 Desember 2024
Wilayah	Kabupaten Gowa



Tetapkan APBD 2025 Rp2,19 T

Tetapkan APBD 2025 Rp2,19 T

RAPBD 2025 Gowa telah disahkan. Angkanya Rp2,197 triliun. Keputusan tersebut diambil dalam Rapat Paripurna DPRD Gowa, kemarin. Wakil Bupati Gowa Abd Rauf Malaganni menjelaskan bahwa RPJPD dirancang sebagai pedoman pembangunan daerah untuk 20 tahun ke depan.

Dokumen ini akan menjadi acuan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) setiap lima tahun dan Rencana Kerja



**Abd Rauf
Malaganni**

ja Pemerintah Daerah (RKPD) setiap tahun.

"RPJPD ini memberikan landasan hukum yang kuat untuk melaksanakan kewenangan daerah dengan tujuan membangun Kabupaten Gowa yang lebih baik dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di masa depan," ujarnya.

Visi RPJPD Kabupaten Gowa, yaitu "Gowa, Unggul, Maju, dan Berkelanjutan," sejalan dengan visi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) dan RPJPD provinsi, yang berfokus pada keberlanjutan pembangunan.

"Kami berkomitmen untuk memastikan APBD 2025 meningkatkan kualitas layanan publik, mempercepat pemulihan ekonomi, dan memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat Gowa," tambah Abd Rauf.

Prioritas pembangunan dalam APBD 2025 meliputi sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan ekonomi masyarakat.

"Dengan anggaran pendapatan sebesar Rp2,197 triliun dan belanja daerah sebesar Rp2,192 triliun, kami optimis dapat memenuhi kebutuhan dasar masyarakat dan menyelesaikan program prioritas daerah," ujarnya.

Abd Rauf juga mengajak masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam pembangunan, memastikan kebijakan pemerintah daerah benar-benar relevan dengan kebutuhan masyarakat.

Sebelumnya, Bupati Gowa, Adnan Purichta Ichsan, menyatakan bahwa tantangan ke depan, khususnya menuju Indonesia emas pada 2045, adalah mempersiapkan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas.

"Jadi tahun depan keberlanjutan program prioritas akan berfokus pada sektor pendidikan, namun tetap mendukung pembangunan prioritas lainnya di tingkat nasional, provinsi, dan daerah," tuturnya. (sae-ris/zuk)